



TPA PIYUNGAN DI AMBANG BATAS PEMAKAIAN Proyek PSEL Tahap II Ditargetkan Beroperasi 2028

YOGYA (KR) - Pemda DIY sedang beradu dengan waktu dalam menuntaskan krisis persampahan di wilayahnya. Pasalnya setelah proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak bisa masuk tahap pertama, Pemda DIY kini mengalihkan fokus pada skema tahap kedua (batch 2). Adapun untuk operasional fasilitas insinerator ditargetkan pada Juli 2028 mendatang. Langkah itu diambil guna menyiasati tenggat waktu pelarangan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dari Pemerintah Pusat yang jatuh pada Desember 2026.

"Pergeseran ke tahap kedua merupakan upaya percepatan agar pembuangan tidak memakan waktu terlalu lama. Kami sudah bertemu dengan pihak Danantara dan rekanan dari Pertamina. Alasan kami tidak masuk

di batch pertama karena kendala negosiasi kelembagaan. Calon mitra internasional harus memiliki bentuk kelembagaan di sini, misalnya melalui Joint Operation (JO). Ini menjadi kewenangan Danantara untuk meyakinkannya," kata Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Senin (11/5).

Dijelaskan, evaluasi teknis menjadi alasan utama DIY menarik diri dari batch pertama. Karena awalnya, pembangunan dijanjikan rampung dalam 18 hingga 24 bulan. Namun, setelah dialami, durasinya melar hingga 40 bulan.

"Apabila dipaksakan 40 bulan, itu terlalu lama bagi kami yang sedang dalam kondisi mendesak. Insya Allah, jika proses ini lancar, sekitar Juli atau Agustus tahun ini sudah ada kepastian, sehingga Juli 2028 fasilitas sudah

bisa beroperasi," ungkap Ni Made.

Ditambahkan, urgensi itu semakin nyata mengingat TPA Piyungan saat ini berada di ambang batas pemakaian. Berdasarkan surat instruksi dari kementerian, sistem open dumping di TPA Piyungan maksimal hanya diperbolehkan hingga Desember 2026. "Setelah itu, tidak ada toleransi lagi. Sementara kita belum sepenuhnya menerapkan sanitary landfill," ujarnya.

Menurutnya, kondisi di atas menjadi alarm bagi wilayah aglomerasi. Terutama Kota Yogyakarta yang minim lahan. Saat ini, kuota pembuangan residu ke TPA Piyungan dipatok sangat ketat, yakni maksimal 20 ton per hari untuk gabungan tiga wilayah (Kota Yogya, Sleman, dan Bantul) hingga akhir 2026. Sebagai solusi masa transisi (bridging), Ni Made

mengusulkan pembongkaran timbunan sampah lama yang sudah ditutup (capping) untuk diolah kembali menjadi energi. Namun, pihaknya juga menyoroti maraknya pembuangan sampah ilegal di sekitar Piyungan yang mencemari lingkungan.

"Ada PR besar terkait pihak swasta ilegal yang menampung sampah berbayar lalu membakarnya. Ini sangat mengganggu dan sedang kami carikan solusinya bersama akademisi," imbuhnya.

Terkait desentralisasi sampah, Sekda mengungkapkan, Pemda DIY mendorong Pemkot Yogyakarta untuk lebih proaktif menjalin kerja sama business to business (B2B) dengan Bantul dan Sleman. Pemda DIY menegaskan tidak bisa lagi menampung seluruh residu kota di Piyungan.

(Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005